

Hubungan Peran Petugas dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga terhadap Kepemilikan Jamban Sehat di Kabupaten Lebong

Yusran Fauzi*, Fikitri Marya Sari

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author: yusron.stats@gmail.com



©2026. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Info Artikel: Diterima 4 November 2025 ; Direvisi 31 Januari 2026; Disetujui 1 Februari 2026

Tersedia online : 9 Februari 2026 ; Diterbitkan secara teratur : Februari 2026



Cara sitasi: Fauzi Y, Sari FM. Hubungan Peran Petugas dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga terhadap Kepemilikan Jamban Sehat di Kabupaten Lebong. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2026 Feb;25(1):70-76. <https://doi.org/10.14710/jkli.79070>.

ABSTRAK

Latar belakang: Cakupan akses terhadap fasilitas sanitasi di Kabupaten Lebong tahun 2023 sebesar 55,62%. Angka ini merupakan persentase cakupan terendah di Provinsi Bengkulu dan belum memenuhi target 100% akses sanitasi layak sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-6. Sementara itu, akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dapat mengurangi risiko diare sebesar 30–40%. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara kebijakan sanitasi yang ada dan penerapannya pada tingkat rumah tangga. Studi ini diarahkan untuk menganalisis keterkaitan antara peran petugas lapangan serta tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepemilikan fasilitas jamban sehat di wilayah Kabupaten Lebong.

Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif analitik dengan memanfaatkan data sekunder serta desain potong lintang (*cross-sectional*). Variabel yang dianalisis meliputi peran petugas lapangan, tingkat kesejahteraan keluarga, dan kepemilikan jamban sehat. Pelaksanaan studi berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2025 dengan populasi analisis berupa data keluarga di Kabupaten Lebong sebanyak 17.922 keluarga. Data tersebut diperoleh melalui proses pembersihan (*data cleaning*) hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada tahun 2024. Analisis data dilakukan secara univariat menggunakan distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel, serta analisis bivariat dengan uji Chi-Square.

Hasil: Uji univariat memperlihatkan bahwa mayoritas keluarga, yaitu sebesar 65,9%, belum memperoleh pendampingan dari petugas kesehatan dalam aspek sanitasi. Selain itu, lebih dari separuh responden (52,4%) berada pada kategori pra-sejahtera, dan sebanyak 14,9% keluarga masih menggunakan fasilitas jamban yang belum memenuhi kriteria kesehatan. Selanjutnya, hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan bermakna antara peran petugas dengan kepemilikan jamban sehat, dengan nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 1,315 (95% CI: 1,216–1,423). Hubungan yang signifikan juga ditemukan antara tingkat kesejahteraan keluarga dan kepemilikan jamban, dengan nilai PR sebesar 2,046 (95% CI: 1,895–2,210).

Simpulan: Ada hubungan yang signifikan antara peran petugas dan tingkat kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Lebong.

Kata kunci: Peran petugas; Kesejahteraan; Jamban Sehat

ABSTRACT

The Correlation between Officer Role and Family Welfare Level toward the Ownership of Healthy Toilet in Lebong Regency

Background: In 2023, sanitation facility coverage in Lebong Regency reached only 55.62%, representing the lowest achievement among regencies in Bengkulu Province and remaining far below the target of universal access

to proper sanitation as outlined in the sixth Sustainable Development Goal (SDG 6). Adequate sanitation access is known to reduce the risk of diarrheal disease by approximately 30–40%. However, this condition reflects a gap between the availability of sanitation infrastructure and its actual utilization at the household level. Therefore, this study aimed to examine the association between the role of health officers and family welfare status with the ownership of healthy toilets in Lebong Regency.

Method: This study employed an analytical quantitative approach using secondary data with a cross-sectional design. The variables analyzed included the role of health officers, family welfare status, and ownership of healthy toilets. The study was conducted from August to September 2025, involving an analytical population of 17,922 families in Lebong Regency. The data were obtained through a data-cleaning process of the 2024 Family Data Updating Program conducted by the Bengkulu Province Representative Office of BKKBN. Data analysis consisted of univariate analysis using frequency distributions for each variable and bivariate analysis using the Chi-Square test.

Results: The univariate analysis indicated that the majority of families (65.9%) had not received sanitation-related counseling from health officers. In addition, most households (52.4%) were classified as pre-prosperous, and 14.9% still relied on toilets that did not meet health standards. The bivariate analysis revealed a statistically significant association between the role of health officers and healthy toilet ownership, with a Prevalence Ratio (PR) of 1.315 (95% CI: 1.216–1.423). A significant relationship was also found between family welfare status and toilet ownership, with a PR of 2.046 (95% CI: 1.895–2.210).

Conclusion: There is a significance correlation between officer role and family welfare toward the ownership of healthy toilet in Lebong Regency.

Keywords: Officer Role; Welfare; Healthy Toilet

PENDAHULUAN

Sanitasi adalah bagian krusial dari kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas jamban yang memadai di setiap permukiman bagian dari strategi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) yang efektif dalam menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare pada anak balita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi berkontribusi mengurangi kejadian diare pada balita di negara ekonomi tengah dan miskin, sekaligus berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat secara umum.¹ Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dapat mengurangi risiko diare sebesar 30–40%. Isu kesehatan lingkungan yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang meliputi aspek sanitasi, penyediaan air bersih, kelayakan hunian, pengelolaan limbah padat, dan pembuangan limbah cair.² Penyakit diare merupakan salah satu dampak kesehatan yang sering muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat di Indonesia, terutama pada bayi dan balita.³ Diare dan tifus, yang termasuk penyebab utama kematian balita di Indonesia, merupakan penyakit yang penularannya dipengaruhi oleh kualitas air, sanitasi, dan higiene.⁴ Meskipun demikian, masih ada sejumlah rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki atau menggunakan jamban sesuai standar yang berlaku. Jamban yang layak menjadi faktor penting dalam menurunkan risiko penyakit menular berbasis feses.⁵

Data global untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-6 terdapat sekitar 58,5% dari total penduduk global sudah menikmati layanan sanitasi yang dikelola secara aman pada tahun 2024. Sisanya, lebih dari separuh populasi global, tidak mempunyai kesempatan menggunakan fasilitas sanitasi secara layak.⁶ Sekitar 11,7% rumah tangga di Indonesia masih belum menerapkan praktik buang air besar yang layak menurut data Badan Pusat Statistik. Ketidakmerataan ini lebih nampak di daerah perdesaan dan kawasan dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menargetkan pencapaian akses sanitasi layak secara menyeluruh (100%) sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada poin ke-6, yang menekankan pemenuhan ketersediaan serta pengelolaan air dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat hingga tahun 2030. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi layak telah menjangkau 80,28% rumah tangga di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Kabupaten Lebong menunjukkan persentase cakupan terendah, yaitu sebesar 55,62%.⁷ Angka ini merupakan yang terendah di Provinsi Bengkulu dan belum memenuhi target 100% akses sanitasi layak sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-6. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara kebijakan sanitasi yang ada dan penerapannya pada tingkat rumah tangga.

Keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan seperti petugas sanitasi, kader kesehatan, dan staf puskesmas menjadi faktor utama. Petugas memiliki fungsi dalam memberikan edukasi, penyampaian informasi, advokasi, dan pendampingan kepada masyarakat agar memahami urgensi memiliki jamban yang sehat. Dalam sistem kesehatan, SDM memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan mutu layanan, pemerataan akses, serta efektivitas program kesehatan yang dicanangkan pemerintah maupun institusi terkait.⁸ Intensitas interaksi dan mutu komunikasi petugas terbukti memiliki hubungan positif dengan peningkatan praktik kebersihan dan kesehatan di tingkat rumah tangga.⁹

Sebuah penelitian mengindikasikan bahwa partisipasi aktif tenaga kesehatan dalam sosialisasi dan pemantauan praktik sanitasi meningkatkan kepemilikan jamban sehat hingga 35% di area yang menjadi fokus intervensi dibandingkan dengan area kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran petugas tidak hanya sebatas sebagai penyebar informasi, melainkan juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan motor penggerak keterlibatan masyarakat.¹⁰

Selanjutnya, tingkat kesejahteraan keluarga juga merupakan variabel penting yang mempengaruhi kapasitas unit keluarga dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai. Keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung menghadapi kendala finansial dalam membangun jamban yang sesuai standar. Kesejahteraan keluarga diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan esensial seperti pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Keluarga yang sejahtera umumnya memiliki sumber daya ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesadaran yang lebih tinggi untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas jamban yang sehat.¹¹

Namun, terdapat kompleksitas dan interaksi dalam hubungan antara peran petugas dan kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga kurang mampu yang menerima pendampingan intensif dari petugas memperlihatkan peningkatan praktik sanitasi yang signifikan meskipun memiliki keterbatasan ekonomi.⁵ Sebaliknya, keluarga yang sejahtera namun kurang mendapatkan dukungan dari petugas terkadang masih memiliki jamban yang tidak memenuhi kriteria kesehatan karena minimnya pemahaman teknis dan kepedulian terhadap lingkungan.

Disparitas ini mengindikasikan bahwa efektivitas peran petugas dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menginvestigasi secara empiris keterkaitan antara peran petugas di lapangan dan tingkat kesejahteraan keluarga dalam kepemilikan jamban sehat. Pemahaman mendalam mengenai hubungan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kepemilikan jamban sehat dan berfungsi sebagai dasar bagi perumusan kebijakan dalam merancang strategi intervensi yang relevan, khususnya di wilayah dengan angka kepemilikan jamban sehat yang masih rendah. Hingga kini, kajian pada level lokal yang membahas secara menyeluruh hubungan antara peran petugas dan tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Lebong masih relatif minim.

Sejalan dengan kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan peran petugas dan kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Lebong. Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan dan pengembangan program kesehatan lingkungan di tingkat pelayanan dasar dan pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat peran petugas kesehatan serta meningkatkan kapasitas keluarga dalam menciptakan lingkungan sehat melalui penyediaan jamban yang memadai.

MATERI DAN METODE

Pendekatan kuantitatif analitik diterapkan dalam studi ini dengan menggunakan data sekunder dan desain *cross-sectional*. Variabel penelitian mencakup peran petugas, kesejahteraan keluarga, serta kepemilikan jamban sehat. Studi ini dilaksanakan pada periode Agustus–September 2025 dengan populasi analitik sebanyak 17.922 keluarga di Kabupaten Lebong. Data tersebut diperoleh dari proses *cleaning* data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu tahun 2024. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran sebanyak 20.327 keluarga. Selanjutnya, proses pembersihan data dilakukan dengan menghapus keluarga yang tidak memenuhi kriteria struktur data pemutakhiran pendataan keluarga, di antaranya keluarga yang tingkat kesejahteraannya belum teridentifikasi dan data yang hilang atau tidak termasuk dalam kategori variabel yang diukur. Dalam penelitian ini, peran petugas diukur melalui persepsi responden terhadap keberadaan pendampingan atau sosialisasi oleh petugas kesehatan terkait sanitasi. Sementara tingkat kesejahteraan keluarga mengacu pada klasifikasi resmi BKKBN, yang membagi keluarga ke dalam kategori pra-sejahtera dan sejahtera yang terdiri dari sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III berdasarkan indikator sosial-ekonomi. Variabel dependen, yaitu kepemilikan jamban sehat, dikategorikan menjadi 'memiliki' dan 'tidak memiliki' berdasarkan kriteria sanitasi layak menurut Kementerian Kesehatan RI. Mengingat seluruh variabel penelitian berbentuk kategorikal, analisis hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan sebaran frekuensi masing-masing variabel, yaitu peran petugas, kesejahteraan keluarga, serta kepemilikan jamban sehat. Selanjutnya dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui pengaruh peran petugas dan kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat. Analisis univariat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Peran Petugas, Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan Kepemilikan Jamban Sehat

No	Variabel	f	%
1.	Peran Petugas		
	Tidak Ada	11.809	65,9
	Ada	6.113	34,1

No	Variabel	f	%
2.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga		
	Pra Sejahtera	9.397	52,4
	Sejahtera	8.525	47,6
3.	Kepemilikan Jamban Sehat		
	Tidak Memiliki	2.663	14,9
	Memiliki	15.259	85,1

Tabel 1 menunjukkan dari 17.922 keluarga di Kabupaten Lebong sebagian besar keluarga (65,9%) tidak menerima pendampingan dari petugas kesehatan terkait sanitasi, sebagian besar (52,4%) berstatus pra-sejahtera dan 14,9% masih menggunakan jamban yang tidak memenuhi standar kesehatan. Secara umum, peran petugas dinilai telah berjalan baik, meskipun beberapa keluarga mengatakan bahwa peran petugas dalam mendampingi masyarakat dan sosialisasi terkait sanitasi belum sepenuhnya optimal. Petugas kesehatan, sebagai individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kesehatan, telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengabdikan diri sesuai bidang ilmunya guna mendukung pemerintah dalam upaya mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Petugas kesehatan memiliki peran sebagai sumber informasi atau pendidik, pembimbing, dan pemberi motivasi bagi masyarakat dalam upaya meraih dan memperbaiki kondisi kesehatan keluarga.⁵ Sementara itu, kesejahteraan keluarga memiliki dampak pada kemauan seseorang untuk memperoleh sesuatu. Keluarga yang sejahtera memungkinkan untuk memiliki dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menurunkan akses sanitasi yang layak, sementara peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berkontribusi signifikan terhadap akses fasilitas sanitasi, termasuk jamban keluarga.¹² Akses sanitasi yang memadai, termasuk kepemilikan jamban/latrine layak, berkaitan dengan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.¹³ Penggunaan jamban sangat penting dan merupakan strategi yang efisien secara biaya untuk mengatasi beban penyakit yang terkait dengan pengelolaan limbah tinja yang tidak tepat melalui penguatan kepemilikan jamban.¹⁴

Tabel 2. Peran Petugas dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga terhadap Kepemilikan Jamban Sehat

No	Variabel	Kepemilikan Jamban Sehat		p-value	PR	95% CI	
		Tidak Memiliki	Memiliki			Lower	Upper
		n = 2.663	n = 15.259				
1.	Peran Petugas						
	Tidak Ada	1.911 (16,2%)	9.898 (83,8%)	0,000*	1,315	1,216	1,423
	Ada	752 (12,3%)	5.361 (87,7%)				
2.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga						
	Pra Sejahtera	1.845 (19,6%)	7.552 (80,4%)	0,000*	2,046	1,895	2,210
	Sejahtera	818 (9,6%)	7.707 (90,4%)				

Ket : * (signifikan)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa keluarga yang menyatakan tidak adanya peran petugas, terdapat 1.911 (16,2%) keluarga tidak memiliki jamban sehat dan 9.898 (83,8%) keluarga memiliki jamban sehat, sementara keluarga yang mengatakan ada peran petugas, terdapat 752 (12,3%) keluarga tidak memiliki jamban sehat dan 5.361 (87,7%) keluarga memiliki jamban sehat di Kabupaten Lebong. Untuk menilai pengaruh peran petugas terhadap kepemilikan jamban sehat, dilakukan pengujian statistik menggunakan uji Chi-Square yang menghasilkan nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara peran petugas dan kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Lebong. Hasil tersebut diperkuat oleh nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 1,315 (95% CI: 1,216–1,423), yang mengindikasikan bahwa keluarga yang tidak memperoleh peran atau pendampingan dari petugas memiliki risiko 1,315 kali lebih besar untuk tidak memiliki jamban sehat dibandingkan dengan keluarga yang mendapatkan peran petugas. Berdasarkan pengaruh tingkat kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat diketahui bahwa keluarga pra sejahtera terdapat 1.845 (19,6%) keluarga tidak memiliki jamban sehat dan 7.552 (80,4%) keluarga memiliki jamban sehat, sedangkan keluarga sejahtera terdapat 818 (9,6%) keluarga tidak memiliki jamban sehat dan 7.707 (90,4%) keluarga memiliki jamban sehat di Kabupaten Lebong. Untuk mengetahui hubungan tingkat kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat menggunakan uji statistik *Chi-Square* dan diperoleh nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan keluarga terhadap kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Lebong. Hal ini didukung oleh nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 2,046 (95% CI: 1,895–2,210) artinya keluarga pra sejahtera berisiko untuk tidak memiliki jamban sehat sebesar 2,046 kali lipat dibandingkan dengan keluarga sejahtera.

Hasil analisis bivariat mengindikasikan bahwa peran petugas berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan jamban sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga yang menyatakan tidak adanya peran petugas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tidak memiliki jamban sehat dibandingkan dengan keluarga yang

merasakan adanya peran petugas. Hasil tabulasi silang antara peran petugas dan kepemilikan jamban sehat juga memperlihatkan bahwa masih terdapat keluarga yang telah memperoleh peran petugas namun belum memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan.. Faktor pengetahuan dan pendidikan kemungkinan menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memiliki jamban sehat. Temuan ini sejalan dengan studi mengenai faktor-faktor sosio-budaya dan ekonomi yang mempengaruhi kepemilikan dan penggunaan jamban: survei berbasis komunitas di Distrik Bole Ghana. Analisis regresi logistik dari studi tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar, sekitar enam kali lipat, untuk memiliki jamban dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal.¹⁵ Rendahnya pemahaman di kalangan anggota keluarga sering kali timbul sebagai konsekuensi dari minimnya akses terhadap informasi terkait sanitasi lingkungan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang pentingnya memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan dan kriteria yang mendefinisikan jamban tersebut sebagai jamban yang sehat.¹⁶ Peran petugas kesehatan merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat untuk memiliki jamban sehat.¹⁷ Apabila petugas kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, maka minat masyarakat untuk memiliki jamban akan meningkat.¹⁸ Petugas yang menjalankan program di institusi kesehatan seharusnya memberikan kepercayaan kepada petugas kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat demi mewujudkan kepemilikan jamban yang memenuhi standar kesehatan. Petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program diharapkan untuk mengakui kontribusi petugas kesehatan dan unit rumah tangga dalam penyediaan fasilitas jamban di lingkungan rumah.¹⁴

Hasil studi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya di Desa Kerta Dewa, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, yang menemukan hubungan antara peran petugas kesehatan dan kepemilikan jamban sehat. Analisis data mengindikasikan bahwa ketiadaan peran petugas kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan mengenai jamban sehat berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepemilikan jamban sehat di kalangan responden.¹⁹ Hasil penelitian ini sejalan dengan studi di Desa Suka Datang, Kabupaten Lebong, yang menemukan adanya pengaruh signifikan peran petugas kesehatan terhadap kepemilikan jamban berdasarkan uji Chi-Square ($p < 0,05$).²⁰ Studi di wilayah kerja Puskesmas Jeumpa, Kabupaten Bireuen, juga menemukan hubungan bermakna antara peran petugas kesehatan dan kepemilikan jamban sehat berdasarkan hasil uji Chi-Square ($p < 0,05$).²¹ Studi di wilayah kerja Puskesmas Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, menemukan pengaruh signifikan dukungan petugas kesehatan terhadap kepemilikan jamban sehat berdasarkan uji statistik ($p < 0,05$).²²

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan jamban sehat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keluarga dengan status pra-sejahtera memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak memiliki jamban sehat dibandingkan dengan keluarga yang berada pada kategori sejahtera. Tabulasi silang memperlihatkan bahwa kepemilikan jamban sehat tidak sepenuhnya selaras dengan tingkat kesejahteraan keluarga, karena sebagian keluarga sejahtera masih belum memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pola kebiasaan penggunaan jamban yang dianggap telah memadai oleh keluarga untuk aktivitas sehari-hari. Pengaruh yang agak terbatas pada pemanfaatan jamban kemungkinan timbul dari fakta bahwa faktor perilaku yang menjadi salah satu fokus penting tidak memadai untuk merubah kebiasaan individu yang masih belum memanfaatkan jamban sehat.²³ Perilaku rumah tangga mempengaruhi penggunaan dan pemeliharaan sistem sanitasi di tempat di daerah pedesaan, dengan kepatuhan yang tepat diperlukan untuk mencapai sanitasi di tempat yang berkelanjutan.²⁴

Kondisi lain yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa keluarga, meskipun dikategorikan sebagai keluarga pra-sejahtera, memiliki fasilitas jamban yang memadai. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat pengetahuan keluarga, terutama kepala keluarga, mengenai pentingnya penggunaan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan.²⁵ Rumah tangga yang memiliki akses ke informasi higiene cenderung menerapkan perilaku sanitasi yang lebih baik dan penggunaan jamban yang lebih baik.²⁶

Kesejahteraan keluarga memegang peranan signifikan dalam menentukan kepemilikan fasilitas jamban. Kesejahteraan keluarga yang memadai memungkinkan individu atau keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sementara kesejahteraan keluarga yang rendah dapat menjadi kendala dalam pemenuhan berbagai kebutuhan.²⁷ Status perekonomian keluarga berperan dalam menentukan kemampuan pemanfaatan jamban, baik dari sisi penggunaan maupun pemeliharaan. Pendapatan yang memadai memungkinkan keluarga menyediakan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan.²⁸ Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik biasanya memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, yang berdampak pada kebiasaan penggunaan jamban. Sebaliknya, keluarga yang memiliki pendapatan lebih rendah cenderung melakukan aktivitas buang air besarnya tidak di jamban atau tempat teresponse lainnya disebabkan kendala finansial.²⁹

Temuan studi ini sejalan dengan penelitian mengenai faktor apa saja yang berkaitan dengan kepemilikan jamban sehat di wilayah kerja Puskesmas Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Penelitian tersebut menunjukkan hasil uji Chi-Square dengan nilai $p = 0,002$ ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dan kepemilikan jamban sehat. ²¹ Studi ini juga relevan dengan studi sebelumnya mengenai *Household Access and Utilization of Improved Latrines within SDG 6 Framework* menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi dan faktor kewilayahan secara signifikan memengaruhi akses dan pemanfaatan jamban rumah tangga ($p < 0,001$), yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan sanitasi berbasis ekonomi dan wilayah dalam

pencapaian target SDG 6.³⁰ Studi di Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menemukan hubungan bermakna antara tingkat sosial ekonomi dan kepemilikan jamban sehat berdasarkan hasil uji Chi-Square ($p < 0,05$).³¹ Studi di Desa Kerta Dewa, Kabupaten Musi Rawas Utara, menemukan hubungan bermakna antara pendapatan keluarga dan kepemilikan jamban sehat berdasarkan uji Chi-Square ($p < 0,05$).¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pendampingan petugas kesehatan dan kondisi kesejahteraan keluarga yang belum optimal masih menjadi permasalahan utama dalam kepemilikan jamban sehat. Hubungan yang memiliki makna signifikan untuk peran petugas, kesejahteraan keluarga, dan kepemilikan jamban sehat menegaskan perlunya penguatan peran petugas kesehatan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung percepatan akses jamban sehat di Kabupaten Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

1. Merid MW, Alem AZ, Chilot D, Belay DG, Kibret AA, Asratie MH, et al. Impact of access to improved water and sanitation on diarrhea reduction among rural under-five children in low and middle-income countries: a propensity score matched analysis. *Trop Med Health*. 2023; 51(36): 1-10. <https://doi.org/10.1186/s41182-023-00525-9>
2. World Health Organization. Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2023 Update. Geneva: WHO and UNICEF; 2023.
3. Fauzi Y, Sari FM. Kesehatan Lingkungan dan Risiko Diare pada Anak. Indramayu: Penerbit Adab; 2025.
4. Cameron L, Olivia S, Shah M. Scaling up sanitation: Evidence from an RCT in Indonesia. *Journal of Development Economics*. 2019; 138(5): 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.12.001>
5. Siagian JLS, Su HM. Peran Petugas Kesehatan dan Ketersediaan Air Bersih dalam Kepemilikan Jamban di Kampung Wainlabat Kabupaten Sorong. *Global Health Science (GHS)*. 2021; 6(1): 46-50. <http://doi.org/10.33846/ghs6109>
6. Home | SDG 6 Data [Internet]. [cited 2026 Jan 26]. <https://www.sdg6data.org/en/node/1?utm>
7. Badan Pusat Statistik. Statistik Sanitasi dan Akses Air Bersih Rumah Tangga Indonesia 2023. Jakarta: BPS; 2023
8. Sari FM, Fauzi Y. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan. Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri; 2025.
9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga. Jakarta: Kemenkes RI; 2022.
10. Wulan L, Wibowo A. Peran petugas kesehatan dalam peningkatan kepemilikan jamban sehat di masyarakat pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*. 2020; 15(3): 125–133. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i3.3897>
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pedoman Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN; 2022.
12. Jalunggono G, Islami FS, Hutajulu DM. Socioeconomic Determinants and Their Interactions in Shaping Improved Sanitation Access in Indonesia. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*. 2025; 8(3): 357–368. <https://doi.org/10.15294/efficient.v8i3.38386>
13. Okesanya OJ, Eshun G, Ukoaka BM, Manirambona E, Olabode ON, Adesola RO, et al. Water, sanitation, and hygiene (WASH) practices in Africa: exploring the effects on public health and sustainable development plans. *Tropical Medicine and Health*. 2024; 52(68): 1-9. <https://doi.org/10.1186/s41182-024-00614-3>
14. Ajemu KF, Desta AA, Berhe AA, Woldegebriel AG, Bezabih NM. Latrine Ownership and Its Determinants in Rural Villages of Tigray, Northern Ethiopia: Community-Based Cross-Sectional Study. *J Environ Public Health*. 2020; 2020(1): 1-8. <https://doi.org/10.1155/2020/2123652>
15. Nanyim JK, Mutaru AM, Gbeti C, Issahaku AR, Abubakari A, Wumbei A. Socio-cultural and economic determinants of Latrine ownership and utilisation: a community-based survey in Bole district of Ghana. *BMC Public Health*. 2024; 24(1): 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20521-w>
16. Fathonah U, Rini WNE, Hidayati F, Syukri M, Putri FE. The Relationship Of Knowledge And Defecation Habits With Healthy Latrine Ownership In The Working Area Of Puskesmas Lempur, Kerinci Regency, 2023. *International Journal Of Health Science*. 2024; 4(1): 67–72. <https://doi.org/10.55606/ijhs.v4i1.3516>
17. Syukaisih, Alhidayati, Amalia R, Maharani R, Turindi A. Perilaku Pemanfaatan Jamban Sehat pada Masyarakat Desa Rokan Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu. *Gema Kesehatan*. 2024; 16(2): 91–103. <https://doi.org/10.47539/gk.v16i2.461>
18. Wulandari S, Andria. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba. *Al-Insyirah Midwifery*. 2021; 10(2): 90-95. <https://doi.org/10.35328/kebidanan.v10i2.2072>

19. Hidayati F, Reskiaddin OL, Sonia S. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Kerta Dewa Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kesmas Jambi*. 2023; 7(2): 90-101. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v7i2.24438>
20. Arafah D, Wahyuni ID, Saktiawan Y. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jamban di Desa Suka Datang Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. *Journal of Nursing and Public Health*. 2024; 12(2): 531-540. <https://doi.org/10.37676/jnph.v12i2.7410>
21. Nazira U, Arbi A, Arifin VN. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jamban sehat di wilayah kerja Puskesmas Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Journal of Health Research Science*. 2024; 4(02): 336–343. <https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i2.1379>
22. Rafelza AS, Asriwati A, Anggraini I, Nuraini N, Maryanti E. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Kepemilikan Jamban Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*. 2024; 2(1): 130–139. <https://doi.org/10.57213/antigen.v2i1.215>
23. Caruso BA, Sclar GD, Routray P, Nagel CL, Majorin F, Sola S, et al. Effect of a low-cost, behaviour-change intervention on latrine use and safe disposal of child faeces in rural Odisha, India: a cluster-randomised controlled trial. *Lancet Planet Health*. 2022; 6(2): e110–e121. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00324-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00324-7)
24. Harper J, Abdel Sattar R, Kozole T, Toeur V, Rogla J, Ross M, et al. Household perceptions, practices, and experiences with real-world alternating dual-pit latrines treated with storage and lime in rural Cambodia. *PLoS One*. 2025; 20(10): 1-14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332118>
25. Degu A, Girma M, Melese AB. Latrine Utilization and Associated Factors in Transformed District, West Gojjam Zone, Amhara Region, Ethiopia, 2021. *Environ Health Insights*. 2022; 16(1): 1-7. <https://doi.org/10.1177/11786302221123565>
26. Nastiti A, Daniel D, Oktavia H, Fathiyannisa H, Sudradjat A. Contextual and psychosocial factors predicting sanitation behaviours in rural Indonesia. *BMC Public Health*. 2025; 25(633): 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21893-3>
27. Khamidah, Miswan, Amalinda F. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Pasca Pemicuan STBM di Desa Tinauka Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2023; 6(4): 287-296. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i4.3480>
28. Gargita IW, Miswan, Rosnawati. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jamban Setelah Pemicuan STBM di Desa Pantolobete Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu Despot Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 2020; 3(5): 223-231. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i5.1718>
29. Laika A, Adriyani R. The Relationship Of Respondent Characteristics, Knowledge, Attitudes, And Ownership Of Latrines Towards Its Low Use Of Latrines In Gunung Anyar Village, Surabaya City. *The Indonesian Journal of Public Health*. 2021; 16(2): 188–195. <https://doi.org/10.20473/ijph.v16i2.2021.188-195>
30. Muse YH, Abdikarim H, Ali HM, Hassan MA, Muse AH. Household access and utilization of improved latrines: an analysis using Somaliland nationwide survey data within the SDG 6 framework. *Discover Sustainability*. 2025; 6(325): 1-10. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01135-7>
31. Haryati Boimau CD, Nurjazuli N, Wahyuningsih NE. Hubungan Faktor Ketercukupan Air Bersih dan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Abi Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2022; 10(2): 184–190. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32629>